

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PEDESAAN

OLEH:

RIJA SUDIRJA

Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

**PELATIHAN PARTISIPATORY RURAL APRAISAL (PRA)
BAGI TENAGA PEMANDU DINAS/LEMBAGA TENAGA KERJA
KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA
LEMBANG, 8 s.d. 13 Juli 2007**

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN TENAGA KERJA**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim,

Makalah ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mendapatkan gambaran keterlibatan perempuan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang pertanian ternyata sangatlah berperan besar, namun demikian dalam sistem pengembangan pertanian khususnya di pedesaan, tidaklah memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Mencoba mendekati aspek teoritis dan implementasi, untuk masa yang akan datang pembangunan pertanian dengan melihat aspek jender.

Mudah-mudahan sedikit karya ini memberikan pencerahan bagi para peserta pelatihan dan pembaca sekalian. Kami meyakini bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran, atau masukan yang konstruktif dari para pembaca untuk dilakukan penyempurnaannya.

Bandung, Desember 2007

DAFTAR ISI

Halaman:

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB	
I. PENDAHULUAN	1
II. PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN PROGRAM	1
2.1 Partisipasi Masyarakat Pembangunan Pedesaan	1
2.2 Konsep Perempuan dan Pembangunan dalam Perspektif Gender	2
2.3 Aspek Legal Perempuan dalam Pembangunan	4
2.4 Perempuan, Pertanian dan Irigasi	6
2.5 Perencanaan Partisipatif	7
2.6 Faktor-Faktor Penting Perencanaan Partisipatif	10
III. DISAIN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN SENSITIF JENDER	13
3.1 Program Pengembangan Pertanian Melalui Pelibatan Perempuan	13
3.2 Program Penyuluhan	14
3.2.1 Tujuan	16
3.2.2 Ruang Lingkup	16
3.2.3 Kegiatan	16
3.2.4 Jadwal Kegiatan	17
3.3 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Partisipatif	18
3.3.1 Pengertian/Istilah Monitoring dan Evaluasi	19
3.3.2 Prinsip-prinsip Monev	20
3.3.3 Tahapan-tahapan Monev	20
3.3.4 Cara Melaksanakan Monev	20
3.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Monev	22
IV. SIMPULAN	23
DAFTAR PUSTAKA	24

I. PENDAHULUAN

Menurut Biro Pusat Statistik (1999) dari hasil susenas tahun 1997 dari 198,68 jiwa penduduk Indonesia, 53,06 persen tinggal dipedesaan dengan lapangan pekerjaan utamanya dibidang pertanian. Dari jumlah tersebut, 63,56 persen diusahakan oleh wanita tani, dan sisanya dilakukan oleh pria.

Walaupun jumlah penduduk lebih dari separuhnya adalah perempuan, lebih separuhnya jumlah tersebut berada di pedesaan dan lebih dari separuhnya bekerja di bidang pertanian namun secara keseluruhan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan baik di kota maupun di desa lebih rendah dibandingkan dengan pria.

Menurut BPS (2000) pada tahun 1996 TPAK wanita berumur 10 tahun ke atas hanya 44,6 persen dan mengalami peningkatan menjadi 45,6 persen pada tahun 1999 TPAK wanita di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan (50,58 : 39,26). Tingginya TPAK perempuan di pedesaan banyak wanita yang bekerja sebagai pekerja keluarga. Umumnya perempuan di perkotaan bekerja di sektor perdagangan dan jasa, sedangkan di daerah pedesaan lebih banyak bekerja di sekitar pertanian dan sebagian kecil di sektor perdagangan.

Pada pertanian rasio Jender 48 persen pada tahun 1980 dan meningkat menjadi 54 persen pada tahun 1990. Hal ini berarti terdapat penurunan persentase pekerja pria di sektor yang sama. Dengan kata lain, dalam perkembangannya dimasa yang akan datang, sektor pertanian akan diandalkan sebagai sektor yang secara berkelanjutan akan meyerap sejumlah besar tenaga kerja wanita, khususnya di pedesaan.

Peranan perempuan di sektor pertanian adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah lagi, banyak sekali penelitian yang sudah membuktikannya. Di dunia pertanian khususnya pertanian tanaman pangan pembagian kerja antara pria dan perempuan sangat jelas terlihat, sehingga dengan adanya spesifikasi pekerjaan antara perempuan dan pria sering di katakan bahwa pria bekerja untuk kegiatan yang banyak menggunakan otot dan perempuan bekerja untuk kegiatan yang banyak memakan waktu.

Memfokuskan isu jender dengan memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, akan berpengaruh bukan saja terhadap kinerja suatu program, tetapi juga memberdayakan perempuan dan menimbulkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap suatu sumber usaha. Akses yang lebih baik terhadap sumberdaya juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi produktif.

II. PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN PROGRAM

2.1 Partisipasi Masyarakat Pembangunan Pedesaan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan sangatlah penting dan bahkan menentukan. Menurut Ginanjar Kartasasmita (1955) "*pembangunan memang dapat juga berjalan dengan mengandalkan kekuatan yang ada pada pemerintah namun hasilnya tidak akan sama jika dibandingkan dengan pembangunan yang mendapat dukungan dan partisipasi rakyat*". Karena partisipasi masyarakat tersebut sangat penting, di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Indonesia disebutkan bahwa partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata. Adapun pengertian partisipasi disini diwujudkan dalam memikul beban, tanggungjawab dalam pelaksanaan dan menerima kembali hasil-hasil pembangunan. Meskipun istilah partisipasi sudah menjadi jargon politik yang pewujudannya dalam proses pembangunan ini diinginkan oleh semua orang - tapi sebagai istilah, perkataan partisipasi belum mendapatkan batasan pengertian yang jelas.

Suatu ilustrasi kegiatan partisipasi pembangunan pedesaan telah dikemukakan oleh John M. Cohen dan Norman Uphoff (1977) sebagai berikut: "***With regard to rural development, we saw "participation" including people's involvement in decision-making process about what would be done and how; their involvement in implementing programs and decision making by contributing various resources or cooperating in specific organizations or activities; their sharing in the benefits of development programs; together, these four kinds of involvement appeared to encompass most of what would generally be referred to as "participation" in rural development activities***".

Sementara itu Perserikatan Bangsa Bangsa memberikan definisi partisipasi sebagai "***The creation of opportunities to enable all members of a community and the larger society to actively contribute to and influence the development process and to share equitably in the fruit of development***". Menurut Bank Dunia (1992), partisipasi adalah "***as a process by which people, especially disadvantaged people, influence decisions that affect them***". Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka partisipasi haruslah dilihat sebagai "tujuan" dan "cara". Sebagai tujuan karena partisipasi "***builds skills and enhances people's capacity for action and for enriching their lives***". Sedangkan sebagai

"cara" karena partisipasi : ***"contributes to better development policies and project"***.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui ada empat indikator partisipasi masyarakat, yaitu : pengambilan keputusan (dalam perencanaan), implementasi (pelaksanaan), mendapatkan manfaat (benefit) dan evaluasi (evaluation), atau dapat pula disebutkan bahwa masyarakat harus senantiasa ikut serta dalam setiap tahapan kegiatan

pembangunan. Secara klise seringkali disebutkan bahwa masyarakat tersebut bukanlah hanya sekedar konsumen pembangunan, tapi subyek dari pembangunan.

Adanya keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan ini, sering dikaitkan dengan upaya menumbuhkan rasa memiliki ("***sense of ownership***" atau "***sense of belonging***") terhadap sarana atau prasarana yang dibangun. Dengan adanya rasa memiliki ini pada gilirannya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*). Penelitian tentang dampak beberapa metoda pemberian bantuan terhadap petani, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi menunjukkan hal ini. Untuk jaringan-jaringan irigasi yang dibangun secara partipatif, kualitas fisik bangunannya, kegiatan operasi dan pemeliharannya jauh lebih baik -- bila dibandingkan dengan yang semi partisipatif atau yang sinterklas.

Selain itu, partisipasi ini dapat pula dipandang sebagai salah satu wujud dari demokratisasi dan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Menurut James Midgley (1982) : "***By arguing that ordinary citizens have a right to share in decision making, proponents of community participation reveal the inspiration of democratic ideals***". Selain demokratisasi, partisipasi dapat disebutkan pula sebagai Hak Azasi Manusia. Apabila didudukkan di dalam kerangka berfikir Maslow, partisipasi dapat dipandang sebagai kebutuhan perwujudan diri. Lebih jauh dari itu, kalaulah masyarakat tidak diikuti sertakan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan ini, maka seringkali dijumpai adanya kasus-kasus dimana sarana atau prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan atau kehendak dan kondisi masyarakat setempat.

2.2 Konsep Perempuan dan Pembangunan dalam Perspektif Jender

Langkah pertama yang perlu dipahami dalam membahas peran perempuan dalam pembangunan adalah membedakan konsep seks (jenis kelamin) dengan

konsep gender. Hal ini sangat esensial dalam menganalisis persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan, yang diakibatkan oleh perbedaan jender (*gender differences*) dan ketidakadilan jender (*gender inequalities*) dalam struktur masyarakat.

SEKS ATAU JENIS KELAMIN

Adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Secara biologis laki-laki mempunyai ciri: memiliki penis, jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan mempunyai alat reproduksi: rahim, sel telur, vagina, dan alat untuk menyusui. Perbedaan ini *bersifat permanen* atau sering dikatakan sebagai *kodrat*.

JENDER

Adalah hak dan kewajiban, kedudukan, tanggung jawab, serta peran *laki-laki maupun perempuan* dalam suatu masyarakat yang terjadi akibat konstruksi sosial maupun budaya dan *terus berkembang* sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa selain fungsi reproduksi (haid, hamil, melahirkan, dan menyusui) yang merupakan hak prerogatif perempuan sebagai karunia Tuhan YME, perempuan dan laki-laki secara sosial mempunyai potensi peran yang sama. **Konsep pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dilihat dari perspektif gender berangkat dari ide kesetaraan bukan dominasi.**

Dalam implementasinya, terjadi kerancuan dalam memahami jender dan seks. Hal ini terjadi karena sifat, peran, kedudukan yang ada pada jenis kelamin tertentu terjadi akibat proses sosial yang panjang, sehingga sering dianggap sebagai kodrat yang tidak dapat dipertukarkan dari laki-laki ke perempuan, atau sebaliknya. Misalnya, mendidik dan merawat anak, menjaga kebersihan rumah, dan memasak seolah-olah menjadi kodrat perempuan. Sedangkan laki-laki harus kuat secara fisik agar bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar dan dianggap lebih kuat dari perempuan. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat dipertukarkan.

Perbedaan-perbedaan jender ini tidak menjadi masalah selama tidak merugikan salah satu pihak. Akan tetapi seringkali perbedaan ini menimbulkan ketidakadilan gender, seperti: marginalisasi, subordinasi, stereotipe dan kekerasan, serta bias gender dalam program pembangunan. Contohnya adalah program Revolusi Hijau yang menyebabkan perempuan termarginalisasi, karena dengan menanam padi varietas baru berumur pendek, banyak kegiatan yang biasa dilakukan oleh perempuan digantikan dengan alat yang dioperasikan oleh

laki-laki, misalnya panen (dulu dengan ani-ani sekarang dengan sabit). Akibatnya, perempuan kehilangan pekerjaan yang pada akhirnya kehilangan pendapatan.

2.3 Aspek Legal Perempuan dalam Pembangunan

Secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi penegasan bahwa setiap warga negara (laki-laki dan perempuan) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan.

Peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan mulai mendapat perhatian “serius” dari pemerintah dengan dimasukkannya isu perempuan dalam *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978* dan terbentuknya lembaga *Menteri Peranan Wanita* pada tahun yang sama (yang berubah menjadi *Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan* pada akhir tahun 1999, dimana sebagai mitra sejajar pria, perempuan dapat lebih berperan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada intinya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kemampuan perempuan sebagai sumberdaya insani pembangunan perlu ditingkatkan dan diarahkan secara bersungguh-sungguh melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, agar:
 - Perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya baik dalam keluarga maupun masyarakat;
 - Perempuan dapat lebih memanfaatkan kesempatan yang ada seoptimal mungkin;
 - Perempuan dapat berfungsi sebagai mitra sejajar pria di semua bidang dan proses pembangunan, utamanya berpartisipasi di bidang-bidang non tradisional (misalnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan).
2. Pemberian kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif sebagai mitra sejajar pria perlu ditunjang oleh sikap mental, perilaku, dan pandangan masyarakat terhadap perempuan, terutama peran aktif di luar lingkungan keluarga dan rumah tangga.
3. Penyesuaian sistem dan struktur pranata sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik.

Secara formal kesetaraan antara perempuan dan laki-laki mendapat pengesahan dengan diterbitkannya:

- ✚ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984* tentang “Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan.”
- ✚ *Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 02/Kep/MENUPW/IV/1991* tentang “Pengesahan Pedoman Pelaksanaan

Penanganan Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah.”

- ✚ *Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1995* tentang “Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah”.
- ✚ *Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 1996* tentang “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah”.

Pada perkembangannya, pada tahun 2000 telah diterbitkan *Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000* tentang Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini berisi instruksi kepada menteri, bupati/walikota, kepala lembaga pemerintah non departemen untuk:

1. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif jender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
2. Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan:
 - Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.
4. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Kegiatan Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional, dilaksanakan melalui dua langkah utama, yaitu:

1. Analisis Jender, untuk mengidentifikasi dan memahami ada tidaknya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan jender, termasuk pemecahan masalahnya.
2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang jender.

2.4 Perempuan, Pertanian dan Irigasi

Pengalaman dari berbagai lembaga bantuan internasional menunjukkan bahwa dengan memperhatikan isu gender dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dan keberlanjutan suatu program atau proyek.

Hasil-hasil penelitian tentang peran perempuan dalam pertanian selama dua dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa perempuan adalah juga petani, dan kontribusinya terhadap produksi pertanian dan rumah tangga adalah signifikan (Mehra and Esim, 1998). Dengan demikian, perempuan pedesaan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi, baik melalui kegiatan produktif di usahatani maupun sebagai tenaga kerja tidak dibayar (*unpaid worker*) melalui investasi non material yang dilakukannya di dalam rumah tangga (misal: menumbuhkembangkan anak, disamping kegiatan-kegiatan rumah tangga lainnya).

Malangnya, seringkali oleh masyarakat secara sistematis mereka “dilepaskan/dicabut” dari akses terhadap sumberdaya, pelayanan-pelayanan publik yang esensial, dan proses pengambilan keputusan. Khusus dalam bidang keirigasian, terbaikannya perempuan dalam kegiatan pembangunan terutama disebabkan oleh kurang terwakilkannya mereka dalam organisasi pengguna air. Padahal aktivitas mereka dalam berbagai kegiatan usahatani berkaitan erat dengan kegiatan pengelolaan irigasi.

Oleh karena itu, untuk keberhasilan suatu program, maka harus dipertimbangkan berbagai peran, kebutuhan, dan persepsi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan irigasi. Hambatan-hambatan atau keterbatasan apa yang dihadapi oleh perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi dan pengelolaan irigasi. Jika hal-hal tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan maka akan berpengaruh terhadap kinerja suatu program.

Memfokuskan isu gender dengan memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, akan berpengaruh bukan saja terhadap kinerja suatu program, tetapi juga memberdayakan perempuan dan menimbulkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap suatu sumber usaha. Akses yang lebih baik terhadap sumberdaya juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi produktif.

2.5 Perencanaan Partisipatif

Perencanaan merupakan unsur manajemen yang sangat strategis posisinya dalam setiap kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan. **Perencanaan** adalah:

Usaha yang secara sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (Waterston, 1965).

Suatu bentuk latihan intelegensia (kecerdasan) guna mengelola fakta serta situasi sebagaimana adanya dan juga mencari jalan keluar guna memecahkan masalah (Waterston, 1965).

Planning is a human process that people engage in to define problems and solutions, to decide how solutions can be made to happen, and to decide how to find out if problems have been solved (John Middleton and Yvonne Hsu, 1975).

Produk dari perencanaan adalah rencana atau rencana-rencana yang sangat bermanfaat bagi proses manajemen. Tercapai atau tidaknya suatu tujuan atau kegiatan sangat ditentukan oleh efektif atau tidaknya pendekatan perencanaan. Tujuan atau kegiatan yang berhasil cenderung dimulai dari pendekatan perencanaan yang baik dan efektif.

Pendekatan perencanaan banyak ragam dan sifatnya, ada yang bersifat atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*), campuran, dan pendekatan kelompok. Perencanaan dapat dilihat dari beberapa sisi penting, yaitu dari sisi jangka waktu manfaat rencana dan dari sisi fungsinya. Dari sisi waktu, perencanaan terdiri dari tiga kategori yaitu perencanaan jangka panjang (20-30 tahun ke depan), perencanaan jangka menengah (3-5 tahun ke depan), dan perencanaan jangka pendek (1 tahun). Sedangkan dari sisi fungsinya, perencanaan dikategorikan menjadi perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis adalah perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan-tahapan kegiatan, seperti pada tahap identifikasi, inventarisasi, formulasi, organisasi, pelaksanaan (*actuating/ implementing*), serta monitoring dan evaluasi (*evaluating*).

Implementasi berbagai bentuk pendekatan perencanaan akan sangat ditentukan oleh struktur dan iklim organisasi, tujuan kegiatan, dan sistem pemerintahan. Pada suatu perusahaan/pemerintahan yang otoriter atau sentralistis, pendekatan perencanaan cenderung bersifat *top-down* artinya yang di bawah harus mengikuti dan melaksanakan keputusan yang di atas. Model ini

sangat kaku dan bersifat sementara, oleh karena itu sebagian besar berujung dengan kegagalan.

Menurut Corten (1981), Chaudhri (1983), Cerne (1985), Naim dan Asnawi (1985), **pendekatan sentralistis atau top-down memiliki kelemahan** sebagai berikut:

- 1) Jangkauan yang terbatas,
- 2) Tidak adanya aktivitas lanjutan di masyarakat,
- 3) Fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,
- 4) Menciptakan ketergantungan, dan
- 5) Menciptakan kesenjangan ekonomi.

Sedangkan pada organisasi atau sistem pemerintahan yang demokratis dan otonom, pendekatan perencanaan pembangunan lebih bersifat partisipasi (partisipatif), artinya melibatkan semua komponen atau pihak yang terkait (*stakeholders*), baik pada tahap identifikasi, inventarisasi, formulasi, organisasi, pelaksanaan, maupun pada tahap monitoring dan evaluasi.

Pendekatan partisipatif lahir sebagai reaksi atas pendekatan yang sentralistis atau *top-down*. Istilah partisipasi bukanlah hal yang baru, menurut Perserikatan Bansa-Bangsa (1981), **partisipasi** berarti: *Penciptaan peluang bagi semua anggota masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan mempengaruhi proses pembangunan serta turut menikmati hasilnya.*

Cohen dan Uphoff (1977), menegaskan bahwa sebagai pihak yang ikut menentukan jalannya pembangunan, maka didalam pembangunan yang partisipatif masyarakat harus terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi.

Pembangunan yang berbasiskan masyarakat (*Community Development*) dan otonom, penggunaan pendekatan perencanaan harus lebih bersifat partisipasi dengan menjunjung **prinsip-prinsip** sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan (*empowering*) petani dan *Stakeholders* lainnya.
- 2) Demokratis,
- 3) Transparan,
- 4) Ekonomis,
- 5) Akuntabilitas,
- 6) Fleksibel,
- 7) Bertautan dengan perencanaan dan manajemen strategis,
- 8) Merupakan alat komunikasi, dan
- 9) Holistik
- 10) Berkelanjutan.

Penggunaan pendekatan perencanaan yang searah atas-bawah (*top-down*) dalam pembangunan yang berbasis masyarakat sudah terbukti mengalami kegagalan, seperti halnya dalam kasus pembangunan pertanian di Indonesia.

Pembangunan pertanian merupakan pembangunan yang berbasis masyarakat, oleh karena itu dalam setiap tahapan kegiatannya--seperti identifikasi, formulasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi-- perlu dilakukan secara partisipatif, artinya melibatkan petani, pengguna lainnya, dan pihak terkait lainnya (*stakeholders*).

Dari definisi perencanaan dan partisipatif di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa **Perencanaan Partisipatif** adalah: *Perencanaan yang melibatkan masyarakat setempat secara langsung dalam proses perencanaan* (Conyers, 1994)

Menurut Myrdal (1968), perencanaan partisipatif disebut juga perencanaan demokratis. Menurut Kaunda (1974), perencanaan demokratis adalah tipe perencanaan yang menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat tidak saja lewat wakil-wakil rakyat yang telah dipilih secara bebas tetapi juga lewat keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring.

Perencanaan irigasi partisipatif adalah perencanaan dalam setiap tahapan kegiatan usaha tani yang melibatkan secara aktif petani dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan atau dalam memilih alternatif-alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif --berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah-- untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan usaha tani partisipatif bersifat holistik, artinya disamping dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan usaha tani dilakukan pada setiap level pengambilan keputusan, baik di tingkat kelompok tani, desa, kecamatan, maupun di tingkat kabupaten. Oleh karena perencanaan usaha tani partisipatif merupakan komponen tak terpisahkan dari manajemen pertanian, maka perencanaan pun dilakukan pada semua komponen, seperti perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna memperoleh informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan, serta kebutuhan-kebutuhannya. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui dan merasa memilikinya (Myrdal, 1968). Melibatkan masyarakat dalam pembangunan mereka sendiri berarti menghargai hak demokrasi mereka. Menurut Kaunda (1974), demokrasi menuntut adanya partisipasi masyarakat tidak saja lewat wakil-wakil rakyat yang telah dipilih secara bebas tetapi juga lewat keterlibatan langsung mereka dalam proses

pengambilan keputusan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

2.6 Faktor-Faktor Penting Perencanaan Partisipatif

1) Sumberdaya Manusia

Perencanaan partisipatif akan sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia yang berpartisipasi, baik pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun tingkat partisipasinya. Untuk pengetahuan, sikap dan keterampilan dapat diantisipasi dengan pendekatan fasilitasi, konsultasi, atau pendampingan. Namun untuk tingkat partisipasi jelas memerlukan pemecahan dari masyarakat. **Menurut Conyers (1994)**, perencanaan partisipatif sangat penting, namun masih dihadapkan pada kesulitan yang sedemikian besar dalam memperoleh partisipasi umum yang efektif dan pada kenyataannya hal tersebut menambah rumitnya proses perencanaan. Apa kendalanya dan Bagaimana pemecahannya?

Menurut Middleton dan Yvonne Hsu (1975), tingkat partisipasi masyarakat selama ini baru sampai pada tahap keterlibatan tokoh-tokoh kunci dan wakil-wakil dari organisasi yang ada. Keterlibatan masyarakat secara umum dalam perencanaan partisipatif masih kurang, dan walaupun terjadi lebih bersifat sementara karena adanya daya tarik ekonomi (iming-iming). Ini memerlukan perencanaan untuk menyelesaikannya. Apa kendalanya dan Bagaimana seharusnya?

2) Setting Tujuan

Tujuan perencanaan partisipatif ditentukan oleh tiap-tiap individu yang terlibat, kemudian dianalisis dan dirumuskan secara bersama-sama hingga diperoleh tujuan bersama. Tujuan perencanaan harus jelas, wajar, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, waktu, budget, dan sarana-prasarana yang tersedia.

3) Disain Strategi Perencanaan Partisipatif

Dasar strategi perencanaan partisipatif adalah sumberdaya manusia yang kredibel, anggaran yang memadai, metode atau pendekatan yang partisipatif seperti pendekatan kelompok dan pohon masalah untuk menemukan masalah utama, informasi atau data (hasil evaluasi dan Profil Sosio Teknik Kelembagaan) yang akurat dan aktual yang dihasilkan secara partisipatif, dan operasional/sarana prasarana yang memadai, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun di tingkat Kabupaten.

4) *Setting Manajemen Objektif*

Manajemen objektif adalah hubungan antara strategi perencanaan dengan pelaksanaan perencanaan. Ia menjelaskan siapa yang akan mengerjakan strategi, apa dan kapan menerapkannya. Di tingkat lapangan adalah petani dan stakeholders lainnya. Contoh dalam menemukan masalah utama, strategi yang diterapkan adalah pohon masalah dan pendekatan kelompok yang dilakukan oleh petani dan Stakeholders.

5) *Perencanaan Pelaksanaan*

Perencanaan pelaksanaan program partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan secara langsung masyarakat setempat dalam perencanaan pelaksanaan program. Kegiatan ini bisa dilaksanakan jika program kerja telah disiapkan berikut sumberdaya yang dibutuhkan. Perencanaan pelaksanaan dimulai dari penetapan program-program kerja (objek kegiatan) prioritas oleh semua pihak yang terlibat, sumberdaya yang dibutuhkan, siapa yang akan melaksanakannya, kapan waktunya (*scheduling*), berapa anggarannya dan alokasinya (*budgeting*), dan apa hambatan-hambatan kegiatan yang harus diantisipasi. Perlu dilakukan identifikasi komponen program untuk pembagian objek kerja dan alokasi anggaran. Semuanya dirumuskan secara partisipatif oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perencanaan tersebut. Perencanaan pelaksanaan ada pada setiap tahapan kegiatan dan unsur-unsur manajemen.

6) *Perencanaan Monitoring dan Evaluasi*

Fungsi dari monitoring dan evaluasi adalah untuk memaksimalkan dampak atau efek dari program yang direncanakan, untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan, atau untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan. Ada dua komponen utama evaluasi, pertama manajemen informasi yang didasarkan atas pencapaian manajemen objektif, pengembangan informasi kemajuan dan permasalahan pelaksanaan, dan kedua evaluasi program yang didasarkan atas pencapaian tujuan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan dasar bagi perencanaan selanjutnya.

Perencanaan monitoring dan evaluasi dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: kenapa perlu monitoring dan evaluasi, **siapa yang akan melaksanakan monitoring, kapan pelaksanaannya, dimana evaluasi itu akan dilaksanakan, apa yang akan dievaluasi, bagaimana cara mengevaluasi, apa metode atau pendekatan yang akan digunakan untuk**

monitoring dan evaluasi, dan untuk apa hasil evaluasi tersebut. Semua jawabannya dirumuskan secara partisipatif oleh pihak-pihak terkait yang terlibat (keepakatan bersama).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ada yang bersifat jangka pendek pada setiap tahapan-tahapan kegiatan, dan ada juga yang bersifat jangka panjang yang dilakukan pada akhir sebuah kegiatan. Input dari monitoring dan evaluasi jangka pendek adalah perbaikan pada tahapan proses yang sedang berlangsung, sedangkan monitoring dan evaluasi jangka panjang dilakukan diakhir pada seluruh rangkaian kegiatan dan ditujukan untuk perbaikan program selanjutnya atau masukan bagi perencanaan selanjutnya.

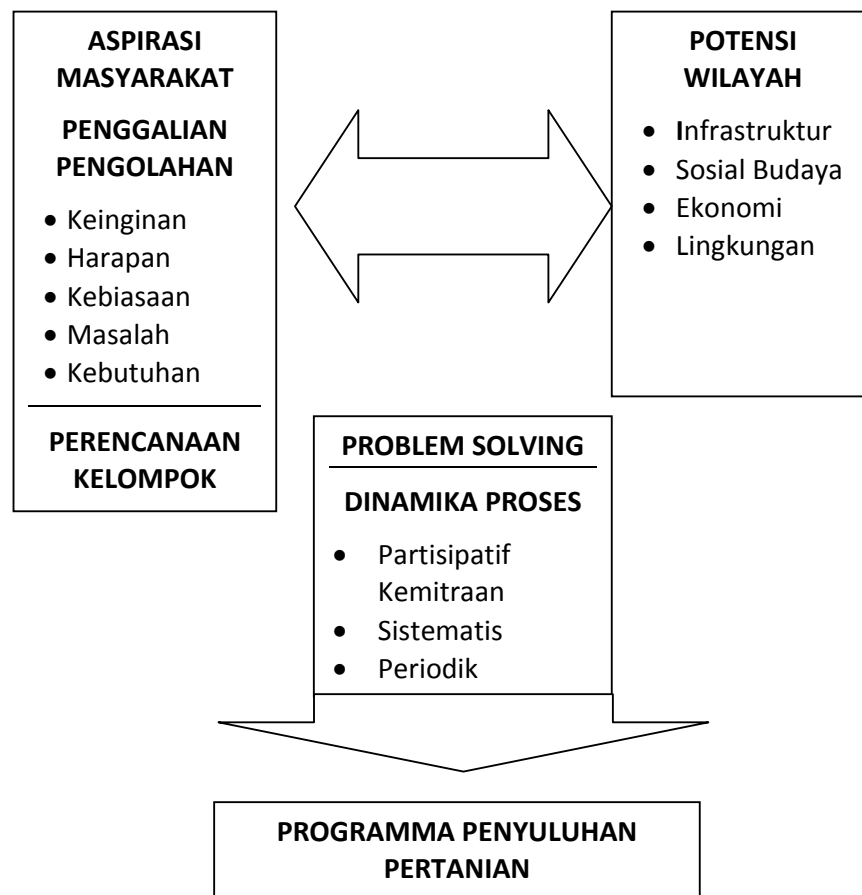
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan manajemen, baik pada perencanaan (persiapan, identifikasi masalah, formulasi), pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga monitoring dan evaluasi.

III. DISAIN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN SENSITIF JENDER

3.1 Program Pengembangan Pertanian Melalui Pelibatan Perempuan

Proses pembangunan di Indonesia pada hakekatnya mewujudkan masyarakat adil dan makmur, salah satunya adalah pengembangan dalam bidang pertanian. Produk komoditi pertanian merupakan salah satu produk andalan nasional yang tidak tergoyahkan oleh kondisi krisis ekonomi, sehingga mampu mendorong perekonomian di Indonesia.

Secara umum, program pengembangan pertanian diwujudkan dalam sistem pengambilan keputusan (*problem solving*) melalui program penyuluhan, sebagaimana alur dibawah ini:



Menurut Imang Hasansulama (2001), sasaran penyuluhan pertanian memang lebih banyak dititikberatkan pada petani dewasa, karena mereka lebih memiliki kepentingan dalam peningkatan taraf kehidupan keluarganya, namun demikian penyuluhan pertanian juga harus mampu menyenyuh anggota keluarganya yaitu para ibu tani dan pemuda tani. Ibu tani penting untuk dijadikan sasaran penyuluhan pertanian karena dalam pengelolaan usaha pertanian, banyak kegiatan yang spesifik dilakukan oleh ibu-ibu tani, namun yang terpenting adalah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut akses dan control pada pengelolaan usaha pertanian.

Melalui upaya pengarusutamaan jender, arah penyuluhan pertanian bagi para ibu tani hendaknya tidak hanya meliputi aspek peningkatan kemampuan teknis usaha pertanian semata, namun harus mampu menyentuh hal yang lebih mendasar menyangkut aspek demokratisasi, kesetaraan peran, akses dan control serta pengambilan keputusan di dalam keluarga, sesuai dengan perkembangan dan peningkatan kecerdasan intelektual, emosional, dan spriritual mereka.

3.2 Programma Penyuluhan

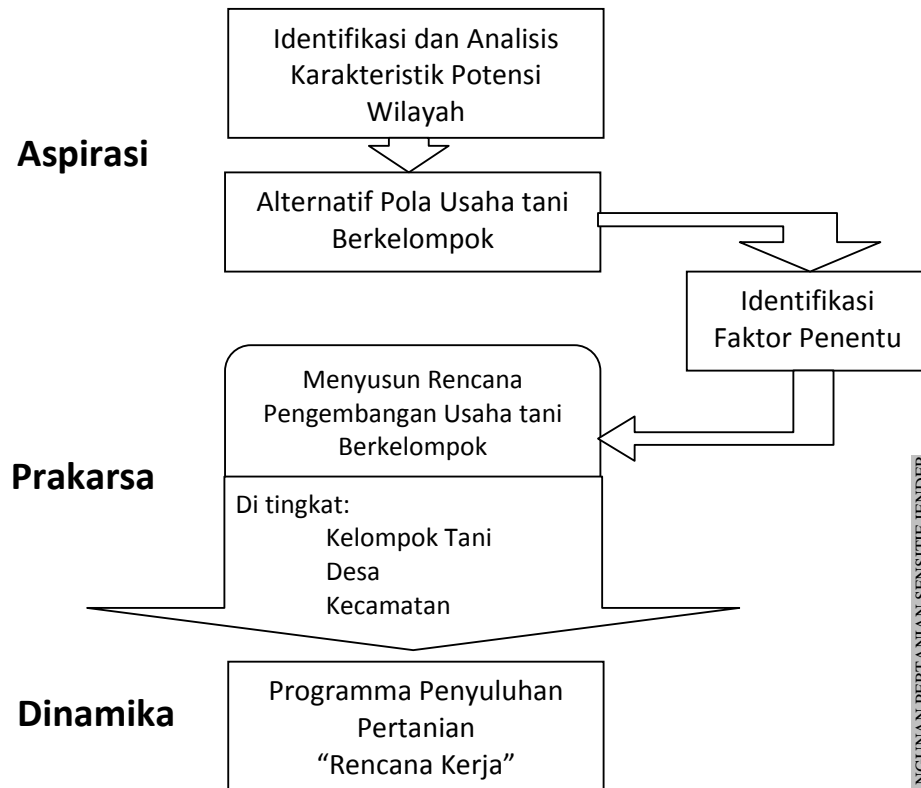
Pengertian : Programma penyuluhan adalah rencana penyuluhan yang memadukan aspirasi masyarakat dengan potensi yang ada dalam program pemerintah yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah, alternative pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis, dan tertulis setiap tahun.

Pendekatan : Melibatkan semua pelaku secara proporsional dalam interaksi membangun dinamika terhadap kesadaran, pengertian, kepedulian, serta ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayahnya sehingga melembaga dan merupakan gerakan masyarakat yang berkesinambungan.

Pemecahan Masalah : Pemecahan dan pengenalan potensi, kendala serta peluang di wilayah berdasarkan; (1) social ekonomi, boofisik merupakan dasar penetapan sasaran/tujuan yang diharapkan, (2) identifikasi kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dengan kinerja sekarang, serta

penganalisaan secara utuh sehingga menghasilkan dukungan, system kinerja, pola bimbingan dan metode pendekatan yang sesuai dengan kondisi spesifik wilayah.

Pada bagian 2.1. disebutkan bahwa sistem kerja penyusunan programma penyuluhan pertanian merupakan proses menggali aspirasi dan mengolah aspirasi tersebut menjadi prakarsa serta memproses prakarsa menjadi dinamika (Gambar 2).



Gambar 2. Sistem Kerja Penyusunan Programma Penyuluhan Pertanian

Dengan demikian, pendekatan perencanaan dari bawah dalam programma penyuluhan pertanian merupakan salah satu wujud dari kebijaksanaan desentralisasi, sehingga penyelenggaraan penyuluhan lebih efektif dan efisien, diharapkan kemandirian daerah dalam pembangunan sejalan dengan pemberdayaan masyarakat ke arah keswadayaan, kemandirian, mantap, dinamis, dan selalu berkembang.

3.2.1 Tujuan

- Memberi arah, pedoman, dan tujuan yang kondusif dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian
- Membangun kesediaan, kesiapan para pelaku dalam penyelenggaraan penyuluhan yang dirumuskan secara kongkrit partisipatif pada setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan pemecahan yang disusun secara partisipatif
- Mengatur pendayagunaan tenaga peralatan, sarana dan prasarana (sumber-sumber potensi yang ada) sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- Menjadi acuan dasar bagi para penyuluh untuk menyusun rencana kerja.

3.2.2 Ruang Lingkup

- 1) Pembuatan dan peningkatan dinamika kelompok tani serta kelembagaannya
- 2) Pengembangan dan penetapan peran serta kelompok dalam kegiatan koperasi
- 3) Penumbuhan dan pengembangan bimbingan kemitraan usaha antara petani dengan berbagai lembaga usaha/keuangan.
- 4) Peningkatan pengaturan teknologi spesifik lokasi dalam bentuk informasi teknologi dan paket teknologi
- 5) Peningkatan efektivitas dan efisiensi sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
- 6) Pengembangan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.2.3 Kegiatan

Berdasarkan sistem kerja penyusunan program penyuluhan pertanian, terdiri dari 6 (enam) tahapan yang paling terkait:

- 1) Rencana kegiatan penyuluhan program penyuluhan pertanian
- 2) Identifikasi potensi wilayah
- 3) Analisa potensi wilayah
- 4) Penyusunan rencana usaha kelompok
- 5) Perumusan program penyuluhan pertanian

- 6) Perumusan program penyuluhan pertanian

3.2.4 Jadwal Kegiatan

Penyusunan program, penyuluhan pertanian terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

- 1) Rencana kegiatan penyusunan program penyuluhan
- 2) Identifikasi potensi wilayah
- 3) Analisa potensi wilayah
- 4) Penyusunan rencana usaha/kerja usaha tani kelompok
- 5) Penetapan factor penentu
- 6) Penyusunan program penyuluhan pertanian

Tabel 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu	
		Lamanya	Periode
1..	Rencana kegiatan penyusunan program penyuluhan		
2.	Identifikasi potensi wilayah		
3.	Analisa potensi wilayah		
4.	Penyusunan rencana usaha/kerja usaha tani kelompok		
5.	Penetapan factor penentu		
6.	Penyusunan program penyuluhan pertanian		

Keterangan:

- Jadwal waktu ini disesuaikan dengan proses dan jadwal rapat, kondisi pembangunan tingkat kecamatan

Kegiatan program penyuluhan pertanian meliputi:

- 1) Masalah
- 2) Kegiatan
- 3) Output Kegiatan
- 4) Sasaran
- 5) Volume/Frekuensi
- 6) Lokasi
- 7) Waktu
- 8) Biaya (Rp)
- 9) Sumber Biaya

- 10) Penanggung Jawab
- 11) Pelaksana
- 12) Pihak Terkait
- 13) Keterangan

Tabel 2. Kegiatan Programma Penyuluhan Pertanian

Malah	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Penjab	Pelaksana	Pihak terkait	Ket.

3.3 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Partisipatif

Sejalan perkembangan jaman, gaung tuntutan keterbukaan yang diteriakkan oleh semua pihak makin menggema. Pertanggung jawaban dan akuntabilitas merupakan dua kata yang tak dapat dipisahkan dari tuntutan keterbukaan tadi. Kondisi seperti ini, pihak yang dituntut (biasanya terkait dengan proyek pembangunan, baik proyek pemerintah, swasta maupun proyek bilateral) membutuhkan piranti yang ampuh dan dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah model Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang sederhana, gampang digunakan tetapi ampuh untuk mengumpulkan data empiris yang valid sehingga objektivitas kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

Biasanya model Monev yang konvensional lebih mengandalkan kepada 'outsider' (pakar orang luar) yang menilai kinerja 'insider' (proyek dan staf proyek) menggunakan prosedur standar, alat-alat dan

indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Sering terjadi, yang dinilai merasa dicari-cari tingkat kesalahannya, menyebabkan penyajian data fiktif atau 'asal Bapak senang' yang tentu saja tidak akan menjamin keterbukaan. Tambahan pula, orientasi terhadap penilaian 'input' yang biasanya dianut oleh Monev yang konvensional cenderung tidak memberikan manfaat bagi yang dinilai. Monev hanya mencoba memuaskan yang melakukan, tidak memuaskan yang dinilai.

Menyadari kekurangan ini, dalam dekade terakhir dikembangkan model Monev yang melibatkan semua pihak, berupa suatu kolaborasi 'outsider' dan 'insider', agen pembangunan, dan pembuat kebijakan yang secara bersama-sama bagaimana kemajuan proyek harus dinilai, dan bagaimana tindak lanjut langkah perbaikannya ('corrective action'). Model ini tidak mencari-cari kesalahan, tetapi memberdayakan, agar dapat dicarikan 'corrective action' sehingga proyek dapat berjalan dengan baik, transparan, sah dan objektif serta mampu memuaskan semua pihak yang terkait.

3.3.1 Pengertian/Istilah Monitoring dan Evaluasi

Monitoring "Monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan. Monitoring adalah kegiatan proyek yang integral, bagian penting dari praktek manajemen yang baik dan karena itu merupakan bagian yang integral dari manajemen sehari-hari" (Casely & Kumar 1987) .

"Monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen proyek"(Calyton & Petry 1983) .

"Monitoring adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa bahwa semua "berjalan untuk direncanakan" dan memberi kesempatan agar penyesuaian dapat dilakukan secara metodologis" (Oxfam 1995).

"Monitoring adalah penilaian yang sistimatis dan terus menerus terhadap kemajuan suatu pekerjaan" (SCF 1995).

"Evaluasi adalah penilaian berkala terhadap relevansi, penampilan, efisiensi dan dampak proyek di dalam konteks tujuan

yang sudah ditetapkan. Evaluasi biasanya menggunakan perbandingan yang membutuhkan informasi dari luar proyek - tentang waktu, daerah atau populasi" (Casely & Kumar 1987).

"Evaluasi adalah penilaian pada waktu tertentu terhadap dampak dari sebuah pekerjaan dan sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan telah dicapai" (SCF 1995).

3.3.2 Prinsip-prinsip Monev

- Partisipatif
- Negosiasi
- Pembelajaran
- Fleksibilitas

Dalam monev ini harus menjawab beberapa hal, yaitu; Siapa yang merancang? Siapa yang melakukan? Bagaimana peranan stakeholders? Bagaimana cara mengukur keberhasilan? Bagaimana pendekatan dilakukan?

3.3.3 Tahapan-tahapan Monev

- 1) Persiapan
- 2) Penyusunan daftar pertanyaan
- 3) Pengumpulan data
- 4) Wawancara
- 5) Survey
- 6) Penyusunan jadwal
- 7) Tabulasi dan analisis data
- 8) Pelaporan

3.3.4 Cara Melaksanakan Monev

a. Metode Pelaksanaan MEP

Metode yang umum dipergunakan adalah:

Pemetaan: untuk memperlihatkan lokasi dan tipe perubahan di lokasi yang dipantau

Diagram Venn: untuk memperlihatkan perubahan yang terjadi didalam hubungan antar kelompok, lembaga, maupun individu

Diagram alur: untuk memperlihatkan dampak langsung maupun tidak langsung dari perubahan, dan mengaitkan dengan penyebabnya

Catatan petani: untuk menjelaskan perubahan dalam kehidupan petani atau kelompok tani

Foto-foto: untuk memperlihatkan perubahan berdasarkan rentetan kejadian yang dipotret

Penilaian matriks: untuk membandingkan preferensi terhadap beberapa opsi atau keluaran

Diagram 'jaringan kerja': untuk memperlihatkan perubahan di dalam tipe dan kadar kontak/ hubungan antara petani dengan pelayanan

b. Indikator

Indikator mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu:

- untuk mengukur
- untuk menyederhanakan
- untuk menginformasikan perubahan

Dengan demikian, maka indikator yang baik harus:

- Dapat diterima dan disusun oleh petani
- Dapat dimengerti masyarakat umum
- Terfokus pada visi
- Dapat dikuantifikasikan dalam arti mudah dijelaskan dan sederhana
- Berdasarkan pada informasi yang benar/akurat
- Berdasarkan pada informasi yang tepat waktu

c. Persiapan Monev di Lapangan

Dalam pelaksanaannya Peserta harus:

- Menjelaskan maksud kedatangannya kepada petani
- Mendiskusikan indikator (yang sudah disiapkan sebelumnya berdasarkan dokumen proyek, bila ada) dengan petani.
Diharapkan terbentuk kesepakatan dengan petani mengenai indikator yang akandigunakan pada monev
- Metode yang dipergunakan
- Memperoleh informasi tentang perubahan yang telah terjadi

- Menyusun rekomendasi untuk perbaikan proyek/kegiatan/pekerjaan
- Mencatat hasil kunjungan pada flipchart untuk dipresentasikan pada forum pleno.

3.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Monev

Kesalahan umum akan mengganjal suatu pelaksanaan monev. Dengan mengetahui hal ini, perencanaan yang telah matang disusun dapat dioperasionalkan (*workable*).

Kesalahan-kesalahan umum yang sering dijumpai pada monev adalah:

- Mengasumsikan bahwa seluruh 'stakeholders' akan berminat dan ambil bagian dalam monev.
- Menetapkan metoda dan indikator yang tidak cocok di dalam upaya men'standard'kannya dan untuk menghemat waktu.
- Menjadikan ketidakjelasan tentang bagaimana informasi akan dipergunakan dan oleh siapa.
- Memulai dengan sesuatu yang sangat besar, dan terlalu dini.

Keterlibatan masyarakat merupakan prasyarat yang menjamin keberhasilan tujuan dari monev. Padahal keragaman masyarakat, dimana monev akan diberlakukan, menentukan variasi banyaknya anggota masyarakat yang ingin terlibat atau memperoleh kesempatan untuk terlibat. Dengan demikian, maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam monev.

Monev adalah sesuatu yang relatif baru sehingga belum tentu semua pihak menerimanya. Oleh karena itu pemahaman tentang keadaan yang dapat mendorong kemudahan melakukan monev harus diketahui. Hal ini penting agar dapat memikirkan bagaimana menciptakan keadaan tersebut agar monev dapat sukses dilakukan.

IV. SIMPULAN

- Teknik atau cara melaksanakan suatu perencanaan membuat program erat kaitannya dengan tujuan, sumberdaya manusia, budget (anggaran), *existing condition*, metode atau *tools*, masalah, dan objek perencanaan.
- Banyak teknik perencanaan yang diterapkan dalam perencanaan partisipatif, seperti pohon masalah, SWOT analisis, Analisis 5W + 1H, Analisis Titik Tanda, Analisis Tulang Ikan, Analisis Medan Daya, Analisis Curah Pendapat, Ballot Box dan sebagainya. Namun analisis peran tersebut mengikuti kaidah 5W + 1H (What, Where, Why, Who, When dan How), jika dapat diterjemahkan sebagai berikut : 1) Apa yang akan dilakukan; 2) Mengapa dilakukan; 3) Di mana akan dilakukan; 4) Siapa akan melakukan; 5) Kapan akan dilakukan, dan 6) Bagaimana dilakukan.
- Peranan wanita dibidang pertanian, telah dibuktikan secara empirik bahwa pekerjaan usaha tani banyak dikerjakan oleh perempuan, akan tetapi kesalahan dalam menginterpretasikan konsep petani selama ini yang menganggap petani itu adalah pria, sehingga yang diikutkan/diundang dalam penyuluhan pertanian adalah prianya. Untuk itu perlu diubah kesadaran jender dari para perencana maupun masyarakat sehingga perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan pria dalam meningkatkan kemampuannya.
- Sejauh ibu tani mau dan mampu berpartisipasi dalam pengelolaan usaha tani, dan masyarakat secara keseluruhan mendukung partisipasi tersebut maka dapat saja ibu tani terus terlibat, akan tetapi pelibatan perempuan ini jangan sampai melanggar tatanan nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Dan yang paling penting diperhatikan adalah jangan sampai keterlibatan perempuan dalam usaha tani membebani tugas perempuan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dudung Abdul Adjid. 1985. Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Pertanian Berencana. Kasus Usahatani Berkelompok Sehamparan Dalam Intensifikasi Khusus (Insus) Padi. Suatu Survei di Jawa Barat. Disertasi. Universitas Padjadjaran.
- FAO-APAN and FARM (R. Fithriadi). 1996. Summary Report of the Training Exercise on Farmer-level Planning, Monitoring and Evaluation, 27 August - 2 September 1995, North Sumatra, Indonesia. Farm Insight Report No. 22. Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
- Ginjar Kartasmita. 1995. Pembangunan Menuju Bangsa Yang Mandiri . Sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai Paradigma, Problematika, dan Peran Birokrasi Dalam Pembangunan. Pidato Penerimaan Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gajah Mada.
- IDS. 1998. Participatory Monitoring & Evaluation: Learning From Change in IDS Policy Briefing Issue 12: Nov 1998, Institute of Development Studies.
- INTRAC. 1997. Handouts INTRAC Training Course on Managing a Participatory Monitoring and Evaluation Process, 22nd - 26th September 1997, Oxford, UK.
- Imang Hasansulama. Petani dan Penyuluh Pertanian Manusia Cerdas. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian – Fakultas Pertanian – UNPAD.
- James Midgley. 1986. Community Participation, Social Development And The State. Methuen & Co. Ltd.
- Jobes, Katja. 1997. Participatory Monitoring and Evaluation Guidelines: Experience in the Fields. St Vincent and the Grenadines. Social Development Division Dissemination Note No.1. Department for International Development, UK.
- John M. Cohen dan Norman T. Uphoff. 1977. Rural Development Participation : Concept and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation. Rural Development Monograph No. 2. Cornell University.
- Maslow. "*Motivation and Personality*".

Wegwood, H. and Alex Bush. 1996. "ITDG's Experience of Participatory Evaluation Oriented Monitoring Systems (POEMS) in the International Food Production Programme." INTRAC's 3rd International Workshop on the Evaluation of Social Development, November 1996, The Netherlands.

World Bank Discussion Papers No. 183. 1992. "Participatory Development and the World Bank". Potential Directions for Change. Edited by Bhuvan Bhatnagar and Aubrey C. Williams.